



DINAMIKA PENGEMBANGAN KURIKULUM MERDEKA ANTARA KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PRAKTIK DI LAPANGAN

Lutfiatun Nisa^{1*}, Rezki Aidil Fitra², Arza Aibonotika³

^{1*,2,3} Universitas Riau

*Email: lutfiatunnisa43@gmail.com, rezki015@gmail.com, arza.aibonotika@lecturer.unri.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.37081/jipdas.v6i3.5161>

Abstrak

Pendidikan selalu berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Dengan demikian adanya perubahan kebijakan kurikulum yang selalu berubah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurikulum adalah inti dari proses pembelajaran disebuah Lembaga Pendidikan. Adanya perubahan kurikulum, maka dibutuhkan sebuah proses yang melibatkan seluruh civitas disebuah Lembaga Pendidikan tersebut. Sedangkan, evaluasi kurikulum adalah sebuah rangkaian kegiatan untuk menilai apakah ada kesenjangan antara konsep teori kurikulum dengan kenyataan di lapangan. Kurikulum Merdeka merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, implementasi Kurikulum Merdeka di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Artikel ini membahas dinamika pengembangan Kurikulum Merdeka, mulai dari kebijakan pendidikan hingga praktik di lapangan. Hasil dari penelitian ini berfokus pada kesenjangan antara konsep teori kurikulum dengan kenyataan dilapangan, sehingga kurikulum Merdeka ini perlu dievaluasi atau ditinjau Kembali.

Kata Kunci: Dinamika, Kurikulum Merdeka, Kebijakan Pendidikan, Praktik.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Merujuk pada hal tersebut, berarti setiap orang yang ada di Indonesia berhak mendapat layanan Pendidikan. Pendidikan menjadi jalan mengubah Nasib bangsa yang tertinggal menjadi bangsa yang maju. Oleh sebab itu Pendidikan selalu diarahkan untuk mencapai tujuan secara nasional. Tujuan Pendidikan nasional diharapkan dapat melahirkan generasi Indonesia yang religious dan bermoral, mampu menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan Rohani, berkepribadian dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut yang harus dikembangkan salah satunya adalah kurikulum Pendidikan. Kurikulum Pendidikan merupakan salah satu bentuk kebijakan yang tidak dapat mendukung pengembangan karakter dan kompetensi (Studi, Pendidikan, Islam, Islam, & Mataram, 2024).

Kurikulum adalah inti dari pada adanya suatu Pendidikan. Dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa definisi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan nasional. Selaras dengan pernyataan tentang kurikulum yang tercantum dalam undang-undang, Hilda Taba juga berpendapat bahwa kurikulum ialah suatu rancangan yang disusun dengan beberapa pertimbangan berbagai hal sehingga memiliki sinkronisasi antara proses pembelajaran dan pengembangan individu (R. Indonesia, 2003). Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi sekolah dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan nasional.

Tujuan utama Kurikulum Merdeka adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan kemampuan siswa dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Kurikulum merdeka belajar digagas menteri pendidikan dan kebudayaan diharapkan menjadi solusi atas berbagai masalah yang terjadi, terutama hal penetapan orientasi tujuan pendidikan. Kebijakan tentang merdeka belajar muncul di era revolusi industry 4.0 dan society 5.0 saat ini. Era revolusi industry 4.0 dan society 5.0 yang memiliki tantangan sekaligus peluang bagi semua lembaga pendidikan di Indonesia (Muslimin, 2023). Tujuan



dari kurikulum merdeka belajar memang didesain agar peserta didik memiliki banyak alternative kompetensi dan keterampilan yang relevan yang dikembangkan di masa depan.

Pada praktik lapangan yang dilakukan ditemukan bahwa penerapan kurikulum merdeka terbatas dalam tiga hal. Pertama, sebagai bagian dari proses penyempurnaan kurikulum agar berdampak paling optimal dalam mengurangi risiko kehilangan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia di masa mendatang. Kedua, menghasilkan praktik yang baik bagi guru dan kepala sekolah yang berpengalaman dalam mengadopsi kurikulum yang kemudian dapat ditularkan ke sekolah lain. Ketiga, pendekatan adaptasi kurikulum yang terbatas dan bertahap juga dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi daerah untuk mempersiapkan sumber daya manusia pada tahap adopsi untuk memberikan penguatan kurikulum yang akan digunakan di masa mendatang (Prihatini Arti, n.d.).

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika pengembangan Kurikulum Merdeka yang terjadi dalam hubungan antara kebijakan pendidikan yang dirumuskan pemerintah dan praktik implementasinya di lapangan. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali pengalaman, persepsi, interpretasi, serta respons para pelaksana pendidikan terhadap berbagai kebijakan yang berkaitan dengan Kurikulum Merdeka.

Penelitian dilaksanakan pada sekolah yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan sekolah yang memiliki pengalaman dalam implementasi Kurikulum Merdeka dan bersedia menjadi lokasi penelitian. Subjek penelitian terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru mata pelajaran, guru penggerak, serta pihak lain yang terlibat dalam pengembangan dan pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan kurikulum.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Data sekunder diperoleh melalui dokumen kebijakan pendidikan, panduan implementasi Kurikulum Merdeka, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), modul ajar, laporan kegiatan sekolah, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (in-depth interview). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman informan terhadap kebijakan Kurikulum Merdeka, proses pengembangan kurikulum di sekolah, tantangan implementasi, serta strategi yang dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan dan kondisi sekolah.

Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas pembelajaran, kegiatan perencanaan kurikulum, dan pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan Kurikulum Merdeka. Observasi bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai praktik implementasi kurikulum di lapangan. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang mendukung penelitian, seperti dokumen kurikulum sekolah, perangkat pembelajaran, laporan kegiatan, notulen rapat, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan implementasi Kurikulum Merdeka.

Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data peneliti menyeleksi, mengelompokkan, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, tabel, atau bagan untuk memudahkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi tahap terakhir dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah disajikan untuk menemukan pola, tema, hubungan, dan makna yang berkaitan dengan dinamika pengembangan Kurikulum Merdeka antara kebijakan pendidikan dan praktik implementasi di lapangan. Kesimpulan yang



diperoleh terus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung guna menjamin validitas temuan.

Uji keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui teknik triangulasi, yang meliputi triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan. Triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi waktu, yaitu melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memperoleh konsistensi informasi. Selain itu, peneliti juga melakukan member checking, yaitu mengonfirmasi hasil wawancara dan interpretasi data kepada informan untuk memastikan kesesuaian antara temuan penelitian dan pengalaman yang disampaikan oleh informan.

Etika Penelitian ini memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, yaitu memperoleh persetujuan dari informan sebelum pengumpulan data, menjaga kerahasiaan identitas informan, serta menggunakan data yang diperoleh semata-mata untuk kepentingan akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika pengembangan Kurikulum Merdeka, khususnya terkait kesesuaian antara kebijakan pendidikan yang dirumuskan pemerintah dengan realitas implementasinya di lingkungan sekolah.

Metode penelitian yang digunakan dalam pemecahan permasalahan termasuk metode analisis. Keterangan gambar diletakkan menjadi bagian dari judul gambar (*figure caption*) bukan menjadi bagian dari gambar. Metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian penelitian dituliskan di bagian ini. Pada metode penelitian, alat-alat kecil dan bukan utama tidak perlu dituliskan, tetapi cukup tuliskan rangkaian peralatan utama saja, atau alat-alat utama yang digunakan untuk analisis dan/atau karakterisasi, bahkan perlu sampai pada tipe dan akurasi dituliskan secara lengkap lokasi penelitian, jumlah responden, cara mengolah hasil pengamatan atau wawancara atau kuesioner, cara mengukur tolok ukur kinerja; metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara detail, tetapi cukup merujuk ke buku acuan. Prosedur percobaan harus dituliskan dalam bentuk kalimat berita, bukan kalimat perintah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka merupakan bentuk transformasi kebijakan pendidikan yang dirancang untuk menjawab tantangan pembelajaran abad ke-21, pemulihan pembelajaran pascapandemi, serta kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik secara lebih fleksibel. Kebijakan ini menempatkan sekolah dan guru sebagai aktor utama dalam pengembangan kurikulum melalui pemberian otonomi yang lebih luas dalam menyusun perangkat pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik dan konteks lokal sekolah (Azmi, Hadiyanto, & Rusdinal, 2023).

Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran berbasis kompetensi, diferensiasi pembelajaran, serta penguatan Profil Pelajar Pancasila. Perubahan paradigma ini menunjukkan pergeseran dari kurikulum yang bersifat sentralistik menuju model yang lebih adaptif dan kontekstual. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut memerlukan kesiapan sumber daya manusia, sarana pendukung, serta budaya sekolah yang mendukung inovasi pembelajaran (Fatkhurohim, Arifin, & Efendi, 2025).

Hasil penelitian memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas kebijakan yang dirumuskan pemerintah dengan kondisi riil di lapangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tidak semua sekolah memiliki tingkat kesiapan yang sama dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Perbedaan kompetensi guru, ketersediaan sarana-prasarana, dukungan teknologi, serta karakteristik wilayah menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kurikulum. (Irwan & Kamarudin, 2021)

Sebagian besar guru mengalami kesulitan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen diagnostik. Guru masih berorientasi pada pendekatan teacher-centered learning, temuan ini sejalan dengan penelitian Darling Hammond et al. (2023) di teaching and teacher education yang menegaskan pentingnya pelatihan berbasis praktik reflektif agar guru mampu menyesuaikan metode dengan kebutuhan peserta didik. (T. Hasballah & Zulfatmi, 2024)



Guru pada umumnya memahami tujuan Kurikulum Merdeka sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Akan tetapi, banyak guru masih mengalami kesulitan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, asesmen formatif, dan penyusunan modul ajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi kurikulum tidak hanya memerlukan perubahan dokumen kebijakan, tetapi juga transformasi kapasitas sumber daya manusia pendidikan. (Irwan & Kamarudin, 2021)

Pelaksanaan pembelajaran kurikulum sebelumnya yakni kurikulum 13 berubah menjadi kurikulum merdeka, guru menyadari dan merefleksikan kesulitannya dalam pelaksanaan pembelajarannya menjadi kendala yang cukup sulit diatasi karena materi pembelajaran tidak dijelaskan secara rutin dan terstruktur, tetapi tergantung pada tema yang dipelajari. (Prihatini Arti, n.d. 2022)

Dalam perspektif implementasi kebijakan, temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan aktor pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Dengan demikian, implementasi Kurikulum Merdeka tidak dapat dipahami sebagai proses linear dari pusat ke daerah, melainkan sebagai proses negosiasi antara kebijakan nasional dan kondisi lokal sekolah.

Meskipun menghadapi berbagai kendala, hasil kajian menunjukkan bahwa banyak guru dan sekolah melakukan berbagai bentuk adaptasi terhadap Kurikulum Merdeka. Adaptasi tersebut terlihat dalam pengembangan proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), penggunaan media pembelajaran digital, serta kolaborasi antarguru melalui komunitas belajar. (T. Hasballah & Zulfatmi, 2024)

Temuan ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan tidak selalu bersifat pasif. Guru berperan sebagai agen perubahan yang secara aktif menafsirkan dan mengadaptasi kebijakan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Oleh karena itu, keberhasilan Kurikulum Merdeka tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh kreativitas dan kapasitas guru dalam praktik pendidikan.

Hasil penelitian yang dilakukan (Siswanto et al., n.d.) menunjukkan bahwa implementasi kurikulum Merdeka berjalan lebih efektif di sekolah perkotaan dibandingkan dengan sekolah daerah terpencil, dengan persentase pelaksanaan masing-masing sebesar 80% dan 45%. Perbedaan ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, kurangnya pelatihan guru, dan akses teknologi yang lebih sulit di daerah terpencil.

Tantangan lain yang dihadapi mencakup keterbatasan infrastruktur teknologi, kesiapan guru untuk menerapkan pembelajaran berbasis proyek, serta beban administratif yang menghambat proses pembelajaran. Dampak terhadap hasil belajar siswa terlihat positif, terutama di sekolah perkotaan yang menunjukkan peningkatan pada kreativitas, keterlibatan, dan kemampuan kolaborasi. Sebaliknya, sekolah di daerah terpencil menunjukkan kemajuan lebih lambat.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa Kurikulum Merdeka merupakan bentuk transformasi kebijakan pendidikan yang dirancang untuk menjawab tantangan pembelajaran abad ke-21, pemulihan pembelajaran pascapandemi, serta kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik secara lebih fleksibel dan kontekstual. Kurikulum ini membawa perubahan paradigma dari pendekatan yang bersifat sentralistik menuju pembelajaran yang berpusat pada peserta didik melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi, penguatan Profil Pelajar Pancasila, dan pemberian otonomi yang lebih luas kepada guru serta satuan pendidikan.

Namun, implementasi Kurikulum Merdeka menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas kebijakan yang dirumuskan pemerintah dengan kondisi nyata di lapangan. Perbedaan kompetensi guru, keterbatasan sarana dan prasarana, akses teknologi yang belum merata, serta karakteristik wilayah menjadi faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi. Banyak guru masih mengalami kesulitan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, asesmen diagnostik dan formatif, serta penyusunan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi kurikulum tidak hanya ditentukan oleh



perubahan kebijakan, tetapi juga oleh kesiapan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia pendidikan.

Meskipun demikian, berbagai sekolah dan guru telah menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik melalui pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi dalam komunitas belajar. Temuan ini menegaskan bahwa guru berperan sebagai agen perubahan yang aktif dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal sekolah.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka berjalan lebih efektif di sekolah perkotaan dibandingkan di daerah terpencil. Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan infrastruktur pendidikan, akses teknologi, dan kesempatan mengikuti pelatihan profesional. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka memerlukan dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah melalui pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, penguatan sistem pendampingan, serta penyediaan akses teknologi yang lebih merata.

Dengan demikian, dinamika pengembangan Kurikulum Merdeka memperlihatkan bahwa hubungan antara kebijakan pendidikan dan praktik implementasi di lapangan bersifat dinamis dan saling memengaruhi. Keberhasilan kurikulum tidak hanya bergantung pada kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam praktik pembelajaran yang efektif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, Chairul, Hadiyanto, Hadiyanto, & Rusdinal, Rusdinal. (2023). National Curriculum Education Policy "Curriculum Merdeka And Its Implementation." *International Journal of Educational Dynamics*, 6(1), 303–309. <https://doi.org/10.24036/ijeds.v6i1.437>
- Fatkurohim, Arifin, Miftakul, & Efendi, Nur. (2025). Membangun Paradigma Baru: Model Manajemen Pendidikan Islam Berbasis Transformasi Digital. *AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(3), 175–190. <https://doi.org/10.37348/aksi.v3i3.681>
- Irwan, & Kamarudin. (2021). Jurnal basicedu. Jurnal Basicedu,. *Jurnal Basicedu*, 5(5), 3(2), 524–532. Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/ajie/article/view/971>
- Muslimin, Ikhwanul. (2023). *MERDEKA BELAJAR PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM : STUDI KASUS DI MADRASAH SE-JAWA TIMUR*. 3(1), 31–49.
- Prihatini Arti, Sugiarti. (n.d.). *Citra Kurikulum Baru : Kesiapan Guru dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka*. 58–70. <https://doi.org/10.19105/ghancaran.vi.7447>
- Siswanto, Deny Hadi, Alam, Sri Rahayu, Matematika, Magister Pendidikan, Dahlan, Universitas Ahmad, Guru, Kompeensi, & Merdeka, Kurikulum. (n.d.). *Jurnal Pendidikan DIDAXEI ISSN Online : 2745-6935 Peran Kompetensi Guru dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka ISSN Print : 2797-2488*. 5, 763–773.
- Studi, Program, Pendidikan, Magister, Islam, Agama, Islam, Universitas, & Mataram, Negeri. (2024). *Dampak Evaluasi Penerapan Kurikulum Merdeka Terhadap Prestasi Belajar Siswa di Sekolah*. 9, 1710–1715.
- T. Hasballah, & Zulfatmi. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka: Tantangan, Kebijakan, Dan Dampak Terhadap Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 10(2), 312–322. <https://doi.org/10.37567/jie.v10i2.3404>